

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
BUDGET ISSUE BRIEF
Kesejahteraan Rakyat

Vol. 01, Ed. 6, April 2021

**Bansos Lansia Guna
Meningkatkan Kesejahteraan
Lansia**

Hal. 1

**Upaya dan Anggaran
Percepatan Penurunan
*Stunting***

Hal. 3

**Isu Utama Perguruan Tinggi
Swasta**

Hal. 5



Daftar Isi

Bansos Lansia Guna Meningkatkan Kesejahteraan Lansia	1
Upaya dan Anggaran Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	3
Isu Utama Perguruan Tinggi Swasta.....	5

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo

Redaktur

Marihot Nasution * Martha Carolina

Savitri Wulandari * Mutiara Shinta Andini

Editor

Marihot Nasution

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Memed Sobari * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Bansos Lansia Guna Meningkatkan Kesejahteraan Lansia

HIGHLIGHTS

- Struktur penduduk Indonesia akan memasuki struktur penduduk tua (*ageing population*). Berdasarkan data BPS tahun 2020 persentase lansia mencapai 9,92 persen (26,82) juta lansia, bahkan BPS memproyeksikan tahun 2045 persentase penduduk lansia di Indonesia bisa mencapai 20 persen (63,31) juta lansia.
- Sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk penduduk lansia akan membantu mengurangi kemiskinan. Saat ini, pemerintah telah mempunyai sistem perlindungan sosial lansia khususnya bantuan sosial. Bantuan sosial lansia dari pemerintah pusat menggunakan dana APBN melalui Kemensos yaitu Program Bertujuan Lanjut Usia (Bantu-LU) dan komponen PKH Lansia. Sedangkan program bansos dari pemda melalui dana APBD baru dilakukan di beberapa daerah yaitu DKI Jakarta, Provinsi Bali, dan Provinsi DI Yogyakarta.
- Program bansos lansia diharapkan dapat meningkatkan cakupan manfaat dan besaran nominalnya.

Struktur penduduk Indonesia akan memasuki struktur penduduk tua (*ageing population*), dimana jumlah penduduk yang berusia lebih dari 60 tahun melebihi 7 persen dari total penduduk. Berdasarkan data BPS tahun 2020 persentase lansia mencapai 9,92 persen (26,82) juta lansia, bahkan BPS memproyeksikan tahun 2045 persentase penduduk lansia di Indonesia bisa mencapai 20 persen (63,31) juta lansia. Pada tahun 2020 sudah ada 6 provinsi yang memiliki struktur penduduk tua yaitu DI Yogyakarta (14,71 persen), Jawa Tengah (13,81 persen), Jawa Timur (13,38 persen), Bali (11,58 persen), Sulawesi Utara (11,51 persen), dan Sumatera Barat (10,07 persen).

Peningkatan penduduk lansia di Indonesia perlu menjadi perhatian karena lansia rentan terhadap berbagai risiko dan guncangan khususnya dalam hal ekonomi. Status ekonomi lansia dapat dilihat berdasarkan rumah tinggal lansia tersebut. Berdasarkan data BPS tahun 2020, Lansia di Indonesia mayoritas berada di rumah tangga dengan kelompok 40 persen terbawah sebesar 43,36 persen, kelompok 40 persen pengeluaran menengah sebesar 37,25 persen, dan 20 persen teratas hanya sebesar 19,40 persen (sekitar 2 dari 10 lansia). Fenomena lain yang perlu menjadi perhatian adalah kemiskinan pada lansia. Kemiskinan pada lansia mengindikasikan kerentanan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, kesehatan, dll. Tingkat kemiskinan lansia sebesar 11,1 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,4 persen (Susenas Maret 2019).

Lansia memiliki berbagai kerentanan dan keterbatasan, sayangnya perlindungan sosial khususnya bantuan sosial (bansos) yang diterima oleh lansia ternyata jumlahnya masih sangat terbatas. Padahal sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk penduduk lansia akan membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan nasional secara signifikan. Sebagai contoh, simulasi dampak pemberian bantuan sosial lansia senilai Rp600.000 per bulan pada usia 65 tahun ke atas akan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan nasional menjadi 8,8 persen. Jika bantuan sosial lansia tersebut hanya diberikan sebesar Rp300.000 per bulan maka angka kemiskinan nasional akan tetap menurun ke tingkat 9,4 persen (Susenas, 2017).

Dasar hukum program perlindungan sosial untuk lansia diatur dalam Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri Wulandari

Penulis

Martha Carolina

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia, UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) yang memberikan kerangka hukum untuk perlindungan sosial di Indonesia, dan UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Pemerintah pusat saat ini sudah memiliki program perlindungan sosial lansia khususnya bansos lansia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kelompok lansia yaitu Program Asistensi Lanjut Usia (ASLUT) yang berubah menjadi program Bertujuan Lanjut Usia (Bantu-LU) pada tahun 2019. Program Bantu-LU diberikan kepada lanjut usia tidak potensial, tinggal sendiri/hanya bersama pasangan di rumah tangga non keluarga (bukan penerima PKH). Program Bantu-LU ditujukan bagi lansia dalam kondisi terbaring di tempat tidur. Pada tahun 2019, besaran Bantu-LU sebesar Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 setiap bulan dengan jumlah sasaran Rp300.000 orang lansia di seluruh Indonesia, selanjutnya pada tahun 2020 besaran Bantu-LU mencapai Rp2.700.000 dengan rincian Bantu-LU sebesar Rp1.500.000, dukungan keluarga (pegangan anggota keluarga yang merawat lansia) sebesar Rp500.000, dan dana perawatan serta terapi sosial sebesar Rp700.000 (Kemensos, 2020). Program Bantu-LU ini masih memiliki keterbatasan belum didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia dan keterbatasan kuota penerima Bantu-LU. Wilayah yang telah mendapatkan Bantu-LU masih sedikit antara lain Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kota Tanggerang Selatan, sedangkan kuota lansia yang mendapatkan Bantu-LU hanya berjumlah 20 orang dari masing-masing wilayah.

Program perlindungan sosial lansia lainnya khususnya bansos dari dana APBN lainnya melalui Kemensos adalah PKH Komponen Lansia. Sejak tahun 2016, komponen penerima manfaat (KPM) yang memiliki anggota keluarga lansia mendapatkan tambahan bantuan dana untuk mengurangi beban pengeluaran dan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga penerima PKH yang mengampu lansia. Dalam perjalanan pelaksanaan program PKH komponen lansia mengalami perubahan seperti cakupan usia, jumlah lansia dalam satu KPM, jumlah bantuan, dan unit sasaran. Cakupan program pada tahun 2016, 2018, dan 2020 hanya mencakup lansia berusia 70 tahun ke atas, Pada tahun 2020, besaran bantuan untuk komponen lansia sebagai dampak pandemi Covid-19 bansos meningkat 25 persen dari tahun 2019 menjadi Rp3.000.000 per tahun dan pencairannya setiap bulan. Besaran bantuan komponen lansia tahun 2020 sebesar Rp300.000 per bulan masih di bawah batasan pendapatan garis kemiskinan per Maret 2020 sebesar Rp454.652 per kapita/bulan. Berdasarkan data BPS tahun 2020 penerima PKH komponen lansia baru mencapai 11,13 persen lansia. Jika dilihat dari status ekonomi rumah tangga masih ada penyaluran PKH yang kurang tepat sasaran yaitu 1,48 persen rumah tangga lansia kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang masih tercatat menjadi penerima PKH. Di sisi lain, rumah tangga lansia kelompok 40 persen terbawah yang seyogyanya lebih berhak menerima PKH tercatat hanya 18,40 persen yang tercatat menjadi penerima PKH (BPS, 2020).

Program perlindungan sosial lansia khususnya bansos dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) melalui pemerintah daerah (pemda) baru dilakukan di beberapa daerah yaitu DKI Jakarta dengan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Provinsi Bali, dan Provinsi DI Yogyakarta dengan program bantuan pemakaman lansia terlantar, Jaminan Sosial Lanjut Usia (JLU), fasilitas lansia melalui *home care*, pelayanan harian lansia melalui Taman Werda, fasilitasi lansia melalui *family support*, dan bedah kamar lansia.

Program perlindungan sosial lansia khususnya bansos lansia saat ini dari pemerintah pusat dan daerah perlu menjadi perhatian guna menghadapi ledakan populasi lansia karena akan berpengaruh terhadap sulitnya mencapai kesejahteraan lansia. Kedepannya, program bansos lansia diharapkan dapat menambah cakupan penerima manfaat dan penyesuaian nominal bantuan serendah-rendahnya sesuai batasan pendapatan garis kemiskinan.

Upaya dan Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting*

HIGHLIGHTS

- BKKBN dijadikan sebagai ketua pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting*, hal ini karena BKKBN memiliki tugas di bidang pengendalian kependudukan dan KB.
- Tahun 2019 prevalensi *stunting* sebesar 27,6 persen, angka ini dikhawatirkan naik tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19.
- Upaya BKKBN selama ini melalui intervensi spesifik dengan melakukan sosialisasi dan revitalisasi Posyandu, dan melalui intervensi sensitif secara terintegrasi yang difokuskan di 260 kabupaten/kota.
- Mengingat semakin singkatnya waktu untuk mencapai target 14 persen, BKKBN melakukan PK21 agar mendapatkan data yang *valid* dan akurat. Hasil dari PK21 ini akan menunjukkan indeks pembangunan keluarga.
- Besaran anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperhatikan masyarakat *stunting*.

Pendahuluan

Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan Musrenbangnas RPJMN tahun 2020-2024 menargetkan penurunan *stunting* lima tahun ke depan di angka 14 persen. Dalam penurunan *stunting* ini diperlukan kerja sama lintas sektor dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan menjadi koordinator program percepatan penurunan *stunting*, ketua pelaksana program ini adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

BKKBN dijadikan sebagai ketua pelaksana program percepatan penurunan *stunting* di Indonesia, hal ini sesuai dengan tugasnya sebagai badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB). Dalam hal peraturan pelaksanaan penurunan *stunting*, BKKBN harus terus berkoordinasi dengan Sekretariat Negara RI agar Peraturan Presiden tentang percepatan penurunan *stunting* di Indonesia segera diterbitkan. Peraturan ini merupakan payung hukum yang akan menguatkan program penurunan *stunting* agar dapat mencapai target. Berikut adalah target penurunan *stunting* sesuai RPJMN tahun 2020-2024:

Target Penurunan *Stunting* Sesuai RPJMN Tahun 2020-2024



Sumber: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024

Pada tahun 2019 prevalensi *stunting* berada pada angka 27,6 persen, tetapi dikhawatirkan angka ini naik pada tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Adapun provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat *stunting* paling tinggi berdasarkan jumlah kabupaten/kotanya, diantaranya adalah Papua (tersebar di 27 kabupaten/kota), Nusa Tenggara Timur (tersebar di 21

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab
Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur:
Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina ·
Mutia Shinta Andini · Savitri Wulandari

Penulis
Marihot Nasution · Firly Nur Agustiani

kabupaten/kota), Jawa Barat (tersebar di 20 kabupaten/kota), Jawa Timur (tersebar di 16 kabupaten/kota), Jawa Tengah (tersebar di 16 kabupaten/kota), Sumatera Utara (tersebar di 15 kabupaten/kota), Papua Barat (tersebar di 15 kabupaten/kota), Sulawesi Selatan (tersebar di 11 kabupaten/kota), Aceh (tersebar di 10 kabupaten/kota), dan Nusa Tenggara Barat (tersebar di 8 kabupaten/kota). Dalam mempercepat penurunan *stunting* di Indonesia terdapat beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan tidak sedikit dana yang dialokasikan untuk mendukung program penurunan *stunting*.

Upaya Percepatan Penurunan *Stunting*

Percepatan penurunan *stunting* merupakan bagian dari program prioritas peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui percepatan perbaikan gizi masyarakat sesuai dengan RPJMN tahun 2020-2024 yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan prioritas dalam RKP tahun 2020. Sangat banyak program dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dengan penurunan *stunting*, diantaranya adalah pertama, melalui intervensi spesifik, yaitu langsung menyoar anak, terutama anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), seperti: pemberian makanan pendamping ASI, obat/makanan untuk ibu hamil/bayi berusia 0-23 bulan; dan kedua, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi, dalam hal ini dilaksanakan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di 260 kabupaten/kota sebagai lokus prioritas tahun 2020.

Agar tidak terjadi tumpang tindih program, BKKBN perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta terus melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan petugas lapangan yang terlibat langsung dalam program dan kegiatan percepatan penurunan angka *stunting*. BKKBN pun dapat berupaya melakukan sosialisasi dan revitalisasi Posyandu guna mengoptimalkan peran Posyandu sebagai salah satu instrumen dalam percepatan penurunan *stunting*, upaya ini perlu diusahakan dan dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Kesehatan.

Melihat waktu dalam mencapai target angka *stunting* 14 persen semakin singkat, maka untuk mendapatkan data yang *valid* dan akurat BKKBN melakukan upaya Pendekatan Keluarga 2021 (PK21), hasil dari PK21 ini akan menunjukkan indeks pembangunan keluarga khususnya dari segi kualitas keluarga. Dalam melaksanakan program percepatan penurunan *stunting* sangat dibutuhkan dana yang disesuaikan dengan program/kegiatan yang akan dilakukan, tujuannya agar saat melaksanakan program/kegiatan tidak terkendala terkait dengan keuangannya (anggaran).

Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting*

Kebutuhan anggaran BKKBN tahun 2021 untuk program percepatan penurunan *stunting* harus segera dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian PPN/Bappenas. Adapun usulan kebutuhan anggaran tahun anggaran 2021-2022 adalah sebagai berikut :

Kebutuhan Anggaran Program Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2021-2022

Strategi	Kebutuhan Anggaran			
	2021	2022		
	Belanja BKKBN	Belanja BKKBN	DAK Fisik & BOKB	Sub Total
Pendampingan keluarga berisiko <i>stunting</i>	1.145.169.200.000	513.694.800.000	2.700.003.600.000	3.213.698.400.000

Sumber: Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (April, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, anggaran yang dibutuhkan dari tahun ke tahun meningkat, hal ini menunjukkan pemerintah serius dan fokus dalam memperhatikan masyarakat *stunting*. Dengan anggaran ini, maka para kementerian dan lembaga harus bersungguh-sungguh dalam menerapkan upaya yang sudah disusun pada rencana kerja terkait *stunting*.

Isu Utama Perguruan Tinggi Swasta

HIGHLIGHTS

- Berdasarkan data BPS, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi pada tahun 2020 adalah sebesar 30,85 persen.
- PTS (perguruan tinggi swasta) menyumbang sekitar 96 persen dari total perguruan tinggi di Indonesia dan merupakan tempat belajar sekitar 4,4 juta mahasiswa.
- Per Desember 2019, PTS dengan akreditasi C masih mendominasi. Dari 1.634 PTS yang terakreditasi, 959 diantaranya terakreditasi C dan hanya 38 PTS yang memperoleh akreditasi A.
- Rata-rata biaya kuliah untuk jenjang S1 di PTS Indonesia sebesar USD10.168. Lebih tinggi dibanding biaya kuliah di Malaysia yang sebesar USD5.496-USD8.765.
- Pada tahun 2020, 70 persen mahasiswa di PTS menunggak uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Selain itu, jumlah pendaftar mahasiswa baru mengalami penurunan lebih dari 25 persen.

Keberhasilan pendidikan tinggi di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya jumlah masyarakat yang melanjutkan pendidikan dari jenjang pendidikan menengah ke jenjang pendidikan tinggi yang ditunjukkan melalui Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT). Berdasarkan data BPS, APK PT pada tahun 2020 adalah sebesar 30,85 persen.

Capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi besar perguruan tinggi swasta (PTS) yang menampung sekitar 60 persen mahasiswa Indonesia. Perguruan tinggi swasta berperan penting menyerap lulusan sekolah menengah, memastikan Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi secara optimal, dengan memperluas akses pendidikan tinggi. Namun demikian, kualitas perguruan tinggi swasta masih di bawah perguruan tinggi negeri.

Menurut hasil riset Asian Development Bank (ADB), pendidikan tinggi swasta di Asia, termasuk Indonesia, menghadapi empat isu utama yaitu (1) memperluas akses ke PTS, (2) kualitas perguruan tinggi swasta yang bervariasi, (3) biaya kuliah yang relatif tinggi, dan (4) sulitnya mendapat dukungan dana.

Perluasan Akses Kuliah Melalui PTS

PTS meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi di tengah terbatasnya daya tampung perguruan tinggi negeri (PTN). Secara nasional jumlah perguruan tinggi swasta (3.129 unit) jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perguruan tinggi negeri (122 unit). PTS menyumbang sekitar 96 persen dari total perguruan tinggi di Indonesia dan merupakan tempat belajar sekitar 4,4 juta mahasiswa (Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia 2019).

Peningkatan akses yang kini mendesak adalah menaikkan akses bagi kelompok kurang mampu dan penyandang disabilitas. Namun, jika perluasan akses ini tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah sarjana menganggur.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina ·

Mutiara Shinta Andini · Savitri Wulandari

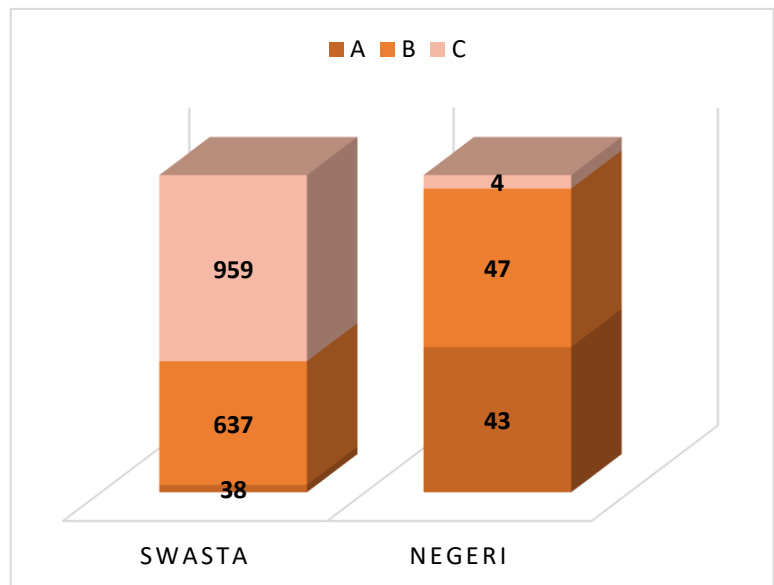
Penulis

Savitri Wulandari

Rendahnya Kualitas PTS

Jumlah perguruan tinggi dengan skala program yang sangat besar menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk menilai kelayakan perguruan tinggi. Proses akreditasi perguruan tinggi sendiri dimulai pada tahun 2007 dan menghasilkan 75 perguruan tinggi terakreditasi. Hingga tahun 2019, 2.383 perguruan tinggi telah terakreditasi. Namun demikian, data per Desember 2019 menunjukkan bahwa PTS dengan akreditasi C masih mendominasi. Dari 1.634 PTS yang terakreditasi, 959 diantaranya terakreditasi C dan hanya 38 PTS yang memperoleh akreditasi A.

Status Akreditasi Perguruan Tinggi Tahun 2019



Sumber: Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia 2019

Tingginya Biaya Pendidikan

Jika dibandingkan dengan negara tetangga yang memiliki kualitas pendidikan tinggi yang lebih baik seperti Malaysia, rata-rata biaya kuliah di perguruan tinggi swasta sampai lulus di Indonesia dua kali lipat lebih mahal dibandingkan biaya kuliah di PTS Malaysia. Menurut riset ADB, rata-rata biaya kuliah S1 (biaya sampai lulus rata-rata empat tahun) di PTS Indonesia sebesar USD10.168, sementara biaya kuliah di Malaysia berkisar antara USD5.496-USD8.765.

Permasalahan Pendanaan PTS

Sumber pendanaan utama PTS adalah biaya kuliah yang dibayarkan oleh mahasiswa. Apabila suatu perguruan tinggi mendapatkan banyak mahasiswa, artinya lebih banyak dana yang dapat dikelola oleh perguruan tinggi untuk menjalankan kegiatan operasional dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Melemahnya perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19 memberikan tekanan besar pada PTS. Tekanan tersebut diakibatkan oleh banyaknya mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah dan berkurangnya jumlah mahasiswa baru. Meskipun pemerintah telah memfasilitasi keringanan uang kuliah melalui Permendikbud Nomor 25 tahun 2020, namun kebijakan tersebut hanya ditujukan bagi PTN di lingkungan Kemendikbud, padahal sebagaimana dilansir oleh Republika, 2020, 70 persen mahasiswa di PTS menunggak uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Selain itu, jumlah pendaftar mahasiswa baru mengalami penurunan lebih dari 25 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Hal tersebut berdampak buruk terhadap kondisi keuangan perguruan tinggi di Indonesia. Kebijakan dan bantuan Pemerintah sangat diperlukan untuk menyelamatkan keberlangsungan PTS di tengah pandemi ini.